

INOVASI KEBIJAKAN KURIKULUM LOKAL UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER LULUSAN

Imas Sumiati¹, Rudi Martiawan²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Pasundan

E-mail: imas.sumiati@unpas.ac.id

Abstrak

Pelindungan bahasa-bahasa lokal, atau bahasa daerah, menjadi isu penting di tengah kepunahan banyak bahasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. sebagai negara dengan lebih dari 718 bahasa daerah, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kekayaan budaya ini, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945. Program revitalisasi bahasa daerah sudah diupayakan untuk menjaga daya hidup bahasa daerah dan mewariskannya kepada generasi muda melalui berbagai metode, salah satunya adalah pendidikan formal di sekolah sebagai muatan lokal. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi potensi muatan lokal dalam pelestarian budaya sehingga menghasilkan sebuah inovasi dalam perumusan kurikulum pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Kata Kunci: inovasi; kebijakan; karakter; muatan lokal; pendidikan

PENDAHULUAN

Pelindungan bahasa-bahasa lokal, atau bahasa daerah, menjadi isu penting di tengah kepunahan banyak bahasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan lebih dari 718 bahasa daerah, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kekayaan budaya ini, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945. Hal ini memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian bahasa daerah, yang telah diatur dalam UU RI No. 24/2009, PP No. 57/2014, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 sebagai simbol identitas, persatuan nasional, dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia.

Program revitalisasi bahasa daerah sudah diupayakan untuk menjaga daya hidup bahasa daerah dan mewariskannya kepada generasi muda melalui berbagai metode, salah satunya adalah pendidikan formal di sekolah sebagai muatan lokal. Pendidikan muatan lokal merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan karakteristik dan potensi daerah. Namun, implementasi muatan lokal di berbagai daerah sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya

minat guru dan belum adanya kurikulum yang terstandarisasi.

Pendidikan muatan lokal tentunya diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Muatan lokal memiliki peran penting dalam pelestarian budaya lokal. Namun, globalisasi dan modernisasi mengancam kelestarian budaya tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kontribusi muatan lokal dalam upaya pelestarian budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rogers (2013), inovasi adalah konsep, metode, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Inovasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan karena keduanya saling berkaitan. Sun et al. (2020) menjelaskan bahwa inovasi yang berkelanjutan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Dalam bidang pendidikan, inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan.

Inovasi pendidikan merupakan rancangan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fadlan (2020) menyebutkan beberapa strategi inovasi pendidikan, seperti strategi fasilitatif, edukatif, bujukan, paksaan, empiris, normatif-reduktif, administratif, dan gabungan politis-administratif. Kebijakan dan inovasi pendidikan sangat penting bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi.

Kebijakan publik merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Sementara itu, William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pola pilihan kolektif yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak.

Kebijakan publik pada dasarnya mencakup proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Edward dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan negara adalah tujuan dan program pemerintah yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang mengatur sistem pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini dibuat untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan dan mendukung pengembangan pendidikan secara inovatif (Junaid, 2016). Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam sistem pendidikan nasional yang mengintegrasikan seluruh aktivitas pendidikan agar saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama.

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta keberlangsungan sistem pendidikan nasional. Menurut Bakry (2010), kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur bidang pendidikan, termasuk pengelolaan sumber daya dan perilaku pendidikan.

Jones (1979) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki lima komponen utama, yaitu:

1. *Goal* (Tujuan), yaitu hasil yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan.
2. *Plans* (Rencana), yaitu langkah kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan.
3. *Programme* (Program), yaitu kegiatan nyata untuk melaksanakan kebijakan.
4. *Decision* (Keputusan), yaitu tindakan dalam menentukan dan menjalankan kebijakan.
5. *Effects* (Dampak), yaitu pengaruh yang muncul setelah kebijakan diterapkan.

Kebijakan pendidikan juga memiliki karakteristik khusus, seperti memiliki tujuan pendidikan yang jelas, memenuhi aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh pihak berwenang, dapat dievaluasi, serta memiliki sistematika yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun pelaksanaan.

Analisis kebijakan pendidikan penting dilakukan untuk memahami arah dan pelaksanaan pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan pendidikan adalah kurikulum muatan lokal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Kurikulum muatan lokal merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, budaya, dan potensi daerah setempat. Muatan lokal bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik mengenai budaya, nilai, dan potensi daerahnya. Darling-Hammond dkk. (2020) menyatakan bahwa kurikulum yang relevan dengan budaya lokal dapat meningkatkan keterlibatan dan

prestasi siswa karena pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Pengembangan pendidikan berbasis muatan lokal perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pendidikan berbasis lokal dapat membantu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat. Implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik kurikulum, strategi implementasi, dan kemampuan pengguna kurikulum, khususnya guru.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 menegaskan peran pemerintah daerah dalam penyusunan muatan lokal, pengembangan perangkat ajar, peningkatan kompetensi pendidik, serta pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan muatan lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

1. Pengembangan Potensi Lokal

Pendidikan muatan lokal bertujuan mengembangkan potensi khas daerah, seperti bahasa, seni, budaya, dan keterampilan tradisional. Potensi tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya lokal.

2. Pelestarian Budaya Lokal

Muatan lokal berperan dalam menjaga budaya daerah agar tidak hilang akibat arus globalisasi. Peserta didik diajarkan untuk memahami dan mencintai budaya lokal melalui pembelajaran bahasa daerah, seni tradisional, maupun adat istiadat.

3. Keselarasan dengan Kebutuhan Daerah

Pendidikan muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya keterampilan pertanian di daerah agraris atau perikanan di daerah pesisir. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih relevan dan aplikatif bagi kehidupan masyarakat.

4. Pembentukan Jati Diri dan Karakter

Muatan lokal membantu membentuk identitas dan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai budaya, rasa bangga terhadap daerah, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan ini juga memperkuat persatuan nasional melalui pemahaman terhadap budaya lokal masing-masing daerah.

METODE

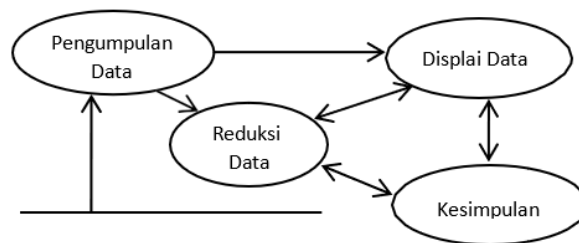
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada analisis kualitatif Studi kasus menggunakan alat analisis pervariabel yang sudah di hubungkan keduanya lalu dianalisis berdasarkan observasi dan wawancara.

1. Analisis Sebelum Lapangan

Analisis-analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Analisis Selama di Lapangan

Penelitian ini menggunakan model “analisis interaktif” dari Miles dan Huberman seperti divisualisasikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman
Sumber: Komponen analisis data menurut Miles & Huberman

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi, peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di unit analisis.

b. Wawancara mendalam dilakukan kepada:

1) *Expert Judgemen* :

a) Prof. Dr. Cecep Darmawan Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia;

- b) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, DPRD Jawa Barat Bidang Pendidikan Komisi D;
 - c) Wilayah CIAYUMAJAKUNING, diambil Kota Cirebon, maka Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon bidang pendidikan komisi D;
 - d) Wilayah JABODETABEK, diambil Depok dan Bekasi maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Depok serta DPRD Kota Bekasi dan Depok bidang pendidikan komisi D;
 - e) Wilayah Bandung Metropolitan, diambil kota Bandung maka Dinas Pendidikan Kota Bandung dan DPRD bidang pendidikan komisi D.
- 2) Informan yaitu pemerhati pendidikan di Jawa Barat, Dewan Pendidikan Jawa Barat, tokoh Masyarakat Jawa Barat.
- 3) Studi Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data dengan proses kodifikasi (koding) melalui catatan harian, memos, transkrip, dan kategorisasi data, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Catatan Harian
 - 1) Menjadi unsur penting dalam membantu peneliti merekam data di lapangan.
 - 2) Dibuat saat mengumpulkan data, wawancara, observasi dan penginderaan
 - 3) Dibuat dengan menulis, membuat notes, merekam, menggambar, membuat sandi dan kode, membuat singkatan- singkatan
 - 4) Merupakan bagian-bagian yang terlepas-lepas satu dengan lainnya
 - b. Memos
 - 1) Catatan harian yang rapi membantu MDAP tahap berikutnya Terutama memos
 - 2) Pengalaman di lapangan dari get in (get out) by disguise # declare yourself menyulitkan peneliti membuat catatan harian yang rapi

- 3) Tidak ada satu teknik menulis note pada kasus get in (get out) by disguise yang membantu peneliti dari kesulitan membuat catatan harian
- c. Transkrip
Salinan catatan harian yang diperoleh dari lapangan, yang dibuat sangat objektif menyerupai keadaan yang terjadi saat pengumpulan data
Isi Transkrip:
 - 1) Isi dan jalannya percakapan dalam wawancara Isi dan jalannya diskusi
 - 2) Peristiwa yang terjadi saat wawancara berlangsung.
- d. Coding
Data coding atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian (Anselm Strauss (1987: 27)
- e. Katagorisasi Data
- f. Thema
Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas. John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California SAGE Publication, 2009), hlm. 191.
2. Focus Group Discussion (FGD), FGD dilakukan untuk mengkonfirmasi data dari berbagai unit analisis.
3. Data dan Sumber Data
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

Berdasarkan uraian metode penelitian di atas, penelitian ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD) guna memperoleh data yang komprehensif dan valid. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan coding, kategorisasi, penentuan tema, serta triangulasi data untuk memastikan tingkat keabsahan hasil penelitian. Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk mendukung proses analisis secara

berkesinambungan sejak sebelum penelitian lapangan hingga selama proses penelitian berlangsung. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang objektif, mendalam, serta memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan kajian dan praktik kebijakan Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi guru Bahasa Sunda di Jawa Barat mencakup kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi bahasa Sunda, tetapi juga mampu melestarikan budaya daerah dan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pelatihan dan sarana pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru terus dilakukan melalui pelatihan, MGMP, dan supervisi klinis. Dukungan kebijakan daerah, pengembangan profesional berkelanjutan, serta penyediaan media pembelajaran yang kontekstual dan inovatif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembelajaran bahasa Sunda dan pelestarian budaya daerah. Kompetensi guru bahasa dalam muatan lokal, khususnya bahasa daerah seperti bahasa Sunda, mencakup beberapa aspek utama yang harus dikuasai agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan karakteristik daerah. Kompetensi tersebut meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik: Guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa daerah secara sistematis, menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal.
2. Kompetensi Profesional: Guru wajib menguasai materi bahasa dan sastra daerah secara mendalam, termasuk aspek lisan dan tulisan, serta budaya yang melekat pada bahasa tersebut.
3. Kompetensi Sosial dan Kepribadian: Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta menjadi teladan dalam penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar.
4. Pengembangan Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran: Guru harus mampu menguasai Capaian Pembelajaran, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan alat evaluasi yang sesuai dengan kurikulum dan karakteristik muatan lokal.

Muatan lokal bahasa daerah diatur oleh kebijakan pemerintah daerah yang berwenang, dengan landasan hukum dan peraturan yang jelas, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini mengatur struktur kurikulum, standar kompetensi, proses pembelajaran, dan penilaian muatan lokal bahasa daerah di Jawa Barat.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, yang mewajibkan pengajaran bahasa daerah di sekolah sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal.
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 75 Tahun 2023 yang menyesuaikan pembelajaran muatan lokal Bahasa dan Sastra Sunda dengan kerangka kurikulum nasional, memastikan muatan lokal terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran.
4. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi bahasa daerah agar tetap berfungsi dalam kehidupan masyarakat sesuai perkembangan zaman.
5. Muatan lokal bahasa daerah diintegrasikan dalam kurikulum nasional, dengan fokus pada pengembangan kompetensi komunikasi, apresiasi budaya, dan penguasaan bahasa daerah secara lisan dan tulisan

Tantangan yang dihadapi guru bahasa Sunda dalam muatan lokal antara lain keterbatasan sarana pembelajaran, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta perubahan kurikulum yang menuntut kemampuan adaptasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru perlu didukung melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan MGMP, serta dukungan kepala sekolah dan dinas pendidikan dalam menyediakan fasilitas dan kebijakan yang menunjang pembelajaran.

Kurikulum Merdeka menempatkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, sehingga guru harus memiliki kompetensi dalam aspek sebagai berikut.

1. Analisis konteks lingkungan sosial, budaya, dan alam untuk mengidentifikasi muatan lokal yang tepat diajarkan di satuan pendidikan.
2. Perumusan kompetensi yang jelas dan sesuai dengan fase pembelajaran, sehingga pembelajaran bahasa daerah dapat terstruktur

- dan terukur.
3. Pengintegrasian kompetensi muatan lokal ke dalam pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
 4. Pengembangan perangkat ajar seperti silabus dan buku teks yang mendukung pembelajaran bahasa daerah secara efektif.
 5. Pelaksanaan pembelajaran yang melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, termasuk aspek bahasa, sastra, adat istiadat, dan budaya daerah.
 6. Menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mendukung guru dalam mengelola pembelajaran bahasa daerah secara kreatif dan adaptif sesuai kurikulum.

Belum semua guru memiliki latar belakang akademik bahasa Sunda, kurangnya media pembelajaran yang sesuai konteks digital, Evaluasi pembelajaran bahasa Sunda sering belum terstandarisasi, Di wilayah perbatasan (Depok, Bekasi, Cirebon), keberagaman bahasa daerah (Betawi, Jawa, Sunda) menjadi tantangan dalam pemilihan mulok.

Tantangan Umum:

- a. Kurangnya pelatihan dan penyegaran;
- b. Minimnya sarana dan bahan ajar;
- c. Motivasi dan minat peserta didik;
- d. Pelatihan dan pengembangan profesional;
- e. Pengembangan perangkat pembelajaran;
- f. Pelestarian kearifan lokal.

Indikator Kompetensi Guru Bahasa Sunda (Contoh dari SDN Sukamelang dan Bandung Barat):

- a. Mampu membuka pelajaran dan menyajikan materi dengan metode yang sesuai.
- b. Menggunakan media pembelajaran secara efektif.
- c. Mengorganisasi dan mengelola kelas dengan baik.
- d. Memberikan penilaian otentik (menyimak, berbicara, membaca, menulis).
- e. Memberikan umpan balik dan inspirasi kepada siswa.

Berikut merupakan hasil studi kasus tentang kompetensi guru di Jawa Barat.

- a. Subang (Studi kasus SDN Sukamelang, Kecamatan Subang)
Guru aksara Sunda memiliki kompetensi baik pada tiga ranah utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran aksara Sunda (rangkai materi, metodologi, media evaluasi)

- b. Bandung Barat (SMP/MTs)
Guru mampu menyusun dan menerapkan penilaian berbasis literasi dalam pembelajaran Bahasa Sunda, sehingga peningkatan mutu pembelajaran lebih terarah dan terukur.
- c. Sukabumi/Sukamanah (SDN 1 Sukamanah)
Kompetensi guru terfokus pada **keterampilan mengajar**, terutama strategi kreativitas siswa saat belajar Bahasa Sunda. Guru menggunakan metode pembelajaran interaktif dan kreatif yang terbukti efektif
- d. Garut
Tesis pada jenjang SD/MI (Kab. Garut, kec. Sukawening) menyoroti peran guru dan orang tua dalam meningkatkan minat baca Bahasa Sunda, namun tidak secara spesifik membahas kompetensi guru profesional
- e. Jawa Barat (umum)
Ada tren digitalisasi materi ajar bahasa Sunda di SD untuk mengatasi keterbatasan sumber dan menurunnya minat siswa; ini menuntut guru menjadi inovatif dan digital-savvy. Standar kompetensi guru Bahasa dan Sastra Sunda di Jawa Barat didasarkan pada SK Gubernur Jabar 2006 mengenai standar kompetensi dasar, meskipun penelitian spesifik per daerah tidak banyak ditemukan. Di daerah lain (Kab. Ciamis), program peningkatan kompetensi guru menekankan peran sebagai “pembelajar mandiri, inovatif, dan agen perubahan”.

Berdasarkan hasil kajian jurnal tentang kompetensi guru basa Sunda dapat dijelaskan sebagai berikut: Hasil Penelitian Jurnal: *Kompetensi Guru Bahasa Sunda di SDN Sukamelang-Subang*.

Judul Jurnal: *Studi Kasus Pembelajaran Aksara Sunda di Sekolah Dasar Lokasi Penelitian: SDN Sukamelang, Kabupaten Subang, Jawa Barat*.

Hasil Penelitian: Kompetensi guru dalam pembelajaran aksara Sunda mencakup kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru telah menyiapkan silabus, RPP, dan bahan ajar sesuai kurikulum, menggunakan metode interaktif serta media sederhana seperti kartu huruf dan papan tulis untuk meningkatkan partisipasi siswa. Evaluasi dilakukan melalui latihan membaca, menulis, dan ulangan harian untuk mengukur pemahaman siswa. Kompetensi guru Bahasa Sunda di SDN Sukamelang memberikan dampak positif terhadap minat dan pemahaman siswa dalam mempelajari aksara Sunda.

Begitu juga hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk peningkatan kompetensi guru bahasa Sunda sebagai berikut.

- a. Hasil Pengabdian – Guru Bahasa Sunda di Kota Depok
Judul Jurnal: *Implementasi Model Pembelajaran Abad 21 dalam RPP bagi Guru Bahasa Sunda di Kota Depok*
Kegiatan: Pelatihan dan pendampingan penyusunan RPP Abad 21 Lokasi: Kota Depok, Jawa Barat.
- b. Hasil pengabdian: Peningkatan kompetensi guru Bahasa Sunda dilakukan melalui pelatihan pembelajaran Abad 21 yang menekankan kemampuan 4C (*Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration*) serta penguatan pendidikan karakter dalam penyusunan RPP. Guru juga dilatih menyusun tujuan pembelajaran berbasis HOTS dan mengembangkan literasi digital serta numerasi dalam pembelajaran.

Meskipun beberapa guru mengalami kendala karena perbedaan latar belakang pendidikan, pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP dan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual. Pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru bahasa Sunda di Depok sesuai kebutuhan pembelajaran masa kini.

Kepemimpinan yang kuat dalam menentukan muatan lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum berbasis potensi dan kearifan lokal. Muatan lokal tidak hanya berfungsi sebagai materi tambahan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, pembentukan karakter, dan penguatan identitas peserta didik sesuai dengan kondisi daerahnya. Karena itu, keputusan mengenai muatan lokal memerlukan kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan budaya lokal melalui pendidikan.

Proses penentuan muatan lokal juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, tokoh masyarakat, dan peserta didik. Pendekatan yang partisipatif membantu sekolah menentukan materi muatan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan karakteristik budaya daerah. Pengorganisasian sumber daya, penyediaan bahan ajar, media pembelajaran, dan pelatihan guru juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan muatan lokal di sekolah.

Evaluasi juga menjadi bagian penting dalam implementasi muatan lokal. Kepala sekolah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pembelajaran serta dampaknya terhadap

pengembangan karakter dan pelestarian budaya peserta didik. Muatan lokal diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap budaya daerahnya.

Regulasi kurikulum muatan lokal di Indonesia menjadi landasan hukum yang memberikan arah dan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan kurikulum sesuai potensi, kebutuhan, dan budaya lokal masing-masing. Muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum yang memuat materi tentang bahasa daerah, budaya, keterampilan, dan kondisi lingkungan setempat dengan tujuan agar peserta didik mengenal, mencintai, dan melestarikan lingkungan sosial budayanya serta memiliki keterampilan sesuai potensi daerah. Pengaturan muatan lokal didukung oleh berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, hingga peraturan daerah seperti peraturan gubernur dan bupati/wali kota.

1. Regulasi Nasional Terkait Muatan Lokal
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013
 - d. Kurikulum Merdeka (2022–sekarang)
2. Regulasi Daerah (Contoh Provinsi Jawa Barat)
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Landasan utama muatan lokal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan harus memuat muatan lokal sesuai potensi daerah. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib mengembangkan kurikulum berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Muatan Lokal dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik, memperkuat identitas daerah, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks keberagaman budaya dan otonomi daerah, muatan lokal tidak lagi dipandang sebagai pelengkap kurikulum, tetapi menjadi bagian penting yang berfungsi menjawab kebutuhan pendidikan sesuai kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setiap daerah.

Keberadaan muatan lokal dalam sistem pendidikan nasional telah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memuat materi lokal yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga menempatkan muatan lokal sebagai bagian dari standar isi kurikulum nasional. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 serta Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Regulasi ini menegaskan bahwa muatan lokal harus disusun secara sistematis berdasarkan potensi, kebutuhan, dan karakteristik daerah.

Inovasi pendidikan lokal menuju digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman, terutama di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang menuntut keterampilan abad ke-21. Wilayah di Jawa Barat yang masih jauh dari digitalisasi umumnya berada di daerah pegunungan, pedesaan terpencil, dan wilayah dengan infrastruktur yang belum merata. Akses internet yang terbatas, sinyal tidak stabil, serta rendahnya ketersediaan perangkat digital menyebabkan guru dan siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring dan mengakses layanan pendidikan berbasis teknologi. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketertinggalan dalam penguasaan literasi digital dan kompetensi abad 21. Oleh karena itu, pelatihan, *workshop*, dan pendampingan bagi guru menjadi langkah penting agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Upaya digitalisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, pengembangan konten lokal, dan pemberdayaan sumber daya manusia guna mewujudkan pemerataan pendidikan di Jawa Barat.

1. Kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat
2. Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut
3. Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut
4. Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut
5. Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut
6. Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut
7. Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut
8. Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut
9. Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut
10. Kecamatan Campaka, Kabupaten Tasikmalaya
11. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tasikmalaya
12. Kecamatan Leles, Kabupaten Tasikmalaya

13. Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Tasikmalaya
14. Desa Cikidang (Lembang), Kabupaten Bandung Barat
15. Desa Kidang Pananjung dan Karya Mukti (Cililin), Kabupaten Bandung Barat
16. Desa Buninagara (Sindangkerta), Kabupaten Bandung Barat
17. Desa Cilangari dan Sindangjaya (Gununghalu), Kabupaten Bandung Barat
18. Desa Bojong Salam dan Cicadas (Rongga), Kabupaten Bandung Barat
19. Desa Margaluyu (Cipeundeuy), Kabupaten Bandung Barat
20. Desa Ganjarsari (Cikalongwetan), Kabupaten Bandung Barat
21. Desa Bojong Koneng (Ngamprah), Kabupaten Bandung Barat
22. Desa Sadangmekar (Cisarua), Kabupaten Bandung Barat
23. Desa Mekarmanik (Cimenyan), Kabupaten bandung
24. Desa Sukamulya (Rancaekek), Kabupaten bandung
25. Desa Cikuncung (Cikuncung), Kabupaten bandung
26. Desa Mandalawangi (Nagreg), Kabupaten bandung
27. Desa Neglasari dan Sudi (Ibun), Kabupaten bandung
28. Desa Neglawangi dan Cihawuk (Kertasari), Kabupaten bandung
29. Desa Sukaresmi (Rancabali), Kabupaten bandung
30. Desa Padasuka (Cimahi Tengah), Cimahi
31. Desa Cipageran (Cimahi Utara), Cimahi
32. Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang
33. Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang
34. Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang
35. Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang
36. Desa Paseh kidul dan Citepok (Paseh), Kabupaten Sumedang
37. Desa Awilega (Tanjungkerta), Kabupaten Sumedang
38. Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon
39. Dusun Nagrak, Desa Sedong Kidul, Kabupaten Cirebon
40. Desa Cidugaleun, Kabupaten Cirebon
41. Kecamatan Ciater, Subang
42. Kecamatan Pagaden, Subang
43. Kecamatan Cislak, Subang
44. Kecamatan Cijambe, Subang
45. Desa Bojongsari, Depok
46. Desa Rangkapan Jaya, Depok
47. Desa Cipayung, Depok
48. Desa Sawangan, Depok
49. Desa Pancoran Mas, Depok
50. Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat
51. Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan
52. Desa Sumberjaya, Cikarang
53. Desa Mangunjaya, Cikarang
54. Desa Telagamurni, Cikarang
55. Desa Sukaraya, Cikarang
56. Desa Sukasari, Cikarang

57. Desa Sukadanau, Cikarang
58. Desa Sukamanah, Cikarang
59. Desa Kedungjaya, Cikarang
60. Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Sukabumi
61. Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Sukabumi
62. Desa Gunungtanjung, Kecamatan Cisolok, Sukabumi
63. Desa Banjarsari, Kecamatan Cidadap, Sukabumi
64. Desa Hegarmulya, Kecamatan Cidadap, Sukabumi
65. Desa Tenjolaut, Kecamatan Cidadap, Sukabumi
66. Desa Cikarae Thoyibah, Kecamatan Cikidang, Sukabumi
67. Desa Cirendang, Kecamatan Cikakak, Sukabumi
68. Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, Sukabumi
69. Desa Pasiripis, Sukabumi
70. Desa Cicareuh, Sukabumi
71. Desa Cibitung, Dusun Kadudahung, Sukabumi
72. Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Sukabumi
73. Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi
74. Desa Kertajaya, Sukabumi
75. Desa Cibuntu, Sukabumi
76. Desa Mekarasih, Sukabumi
77. Desa Sangrawayang, Sukabumi
78. Desa Cimaja, Sukabumi
79. Desa Ridogalih, Sukabumi
80. Desa Sukamaju, Sukabumi
81. Desa Cileungsing, Sukabumi
82. Desa Margalaksana, Sukabumi
83. Desa Karamat Wangi, Kecamatan Cisarupan, Garut
84. Kecamatan Talegong, Garut
85. Kecamatan Cikelet, Garut
86. Kecamatan Cibalong, Garut
87. Desa Sindangprabu, Kecamatan Samarang, Garut
88. Desa Tanjunganom, Kecamatan Samarang, Garut

Desa-desa tersebut secara geografis berada di wilayah yang relatif terpencil dan memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berdampak pada akses pendidikan digital yang masih sangat terbatas, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi berupa pembangunan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta penyediaan perangkat teknologi yang memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti urgensi dan potensi inovasi kebijakan kurikulum lokal dalam upaya menumbuhkan karakter lulusan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman serta kearifan lokal. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum lokal yang inovatif bukan hanya sekadar penyesuaian materi pembelajaran, melainkan sebuah strategi transformatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya, sosial, dan etika ke dalam proses pendidikan. Keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: partisipasi aktif pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, komunitas), fleksibilitas dalam implementasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika lokal.

Inovasi kebijakan kurikulum lokal terbukti mampu menyediakan ruang bagi pengembangan karakter yang lebih personal dan kontekstual, dibandingkan dengan kurikulum nasional yang cenderung bersifat umum. Hal ini memungkinkan sekolah untuk merancang pengalaman belajar yang memperkuat identitas lokal, menumbuhkan rasa bangga, serta membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral, kepedulian sosial, dan kemandirian. Namun, tantangan seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas guru, dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas inovasi ini.

Didapatkan 2 tema dari 7 katagori hasil olah data penelitian, yaitu:

Tema 1: Mulok jadi hal yang amat penting, kategorisasi yang termasuk dalam tema tersebut yaitu:

- a. Kompetensi guru bahasa Sunda;
- b. Kepemimpinan yang kuat dalam pelaksanaan kurikulum;
- c. Pengawasan;
- d. Monitoring dan evaluasi.

Tema 2: Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, katagorisasi yang termasuk dalam tema tersebut yaitu:

- a. Regulasi yang mengatur dalam pelaksanaan kurikulum mulok;
- b. Implementasi dari kurikulum mulok;
- c. Keterlibatan *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, H. (2018). "Inovasi Kurikulum Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Lokal di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(2), 123-135.

- Anggraini, D., & Pratiwi, A. (2022). "Inovasi Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter". *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45-60.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2015). "Towards an analysis of the policies that shape public education". *Management in Education*, 29, 146 – 150
- Budiarto, R., & Lestari, S. (2021). "Kurikulum Lokal sebagai Fondasi Penanaman Nilai Karakter di Era Disrupsi". *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(2), 123-138.
- Burhanudin, J. (2020). *Kolaborasi dan Inovasi Berkelanjutan Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu: Suatu Analisis Urgensi Dewan Pendidikan di Kabupaten Garut*.
- Dewi, K., Putra, A., & Sari, M. (2023). "Peran Kebijakan Lokal dalam Membentuk Karakter Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 78-92.
- Fadlan, L.A. (2020). *Konsep dan Macam-Macam Strategi Inovasi Pendidikan*.
- Firmansyah, I. (2020). *Inovasi Kurikulum: Teori dan Implementasi di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Nusa Media.
- Hasanah, U., & Susanti, R. (2020). "Evaluasi Implementasi Kurikulum Lokal Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembentukan Karakter Siswa". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 201-215.
- Nadlir. (2014). "Urgensi Pembelajaran BerbasisKearifan Lokal". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 02, 300–330.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Setiawan, D. (2017). "Kebijakan Kurikulum dan Pembentukan Karakter Bangsa: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 110-125.
- Wibowo, A., & Anjar, T. (2017). "Internalisasi Nilai KearifanLokal (*Local Wisdom*) dalam Pelaksanaan Konseling Multikultural dalam Pengentasan Masalah Remaja Akibat Dampak Negatif Globalisasi". *Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2017*, 1(0), 1–9.